

## **INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Ditulis pada [Mei 11, 2016](#)

Pemahaman akan kualitas lingkungan hidup penting dipahami guna mendorong semua pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkepentingan guna mempermudah masyarakat awam dan para pengambil keputusan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk memahami kualitas lingkungan hidup Indonesia. Oleh karenanya, KLHK mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi sejak 2009 yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya.

Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Studi-studi tentang kualitas lingkungan berbasis indeks sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi di luar negeri, seperti Columbia University yang menghasilkan Environmental Sustainability Index (ESI) dan Virginia Commonwealth University yang menghasilkan Environmental Quality Index (EQI). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibukota provinsi sejak 2007. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Danish International Development Agency (DANIDA) juga mulai mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada dasarnya

merupakan modifikasi dari Environmental Performance Index (EPI) pada tahun 2009. EPI sendiri merupakan studi yang dipublikasikan oleh Yale University dan Columbia University yang berkolaborasi dengan World Economic Forum dan Joint Research Center of the European Commission pada tahun 2008.

Sesuai dengan Rancangan RPJMN bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 Bidang Lingkungan Hidup :

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca : dari 15,5% (baseline tahun 2014) menjadi 26,0% pada tahun 2019
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : dari nilai 63,0 – 64,0 (baseline tahun 2014) menjadi 66,5 – 68,5 pada tahun 2019
3. Penambahan luas Rehabilitasi Hutan dari 2 juta ha pada tahun 2014 bertambah seluas 750 ribu ha sampai tahun 2019.